

Perjuangan Seorang Perempuan “Raisah” dari Pinggiran Kota Padang dalam Dinamika Politik Lokal Tahun 1930-an Sampai Orde Baru

Siti Fatimah

Universitas Negeri Padang, Indonesia

sitifatimah@fis.unp.ac.id

Abstract

This study, aims to describe Raisah's efforts as a local female figure in developing renewed understanding in Mata Air and its surroundings, especially in the field of education. In addition, this study also wants to explain the place and position of Raisah in the dynamics of local politics from the 1930s to the New Order. This research uses the historical method that is combined with the life story or biography method. The results of the study illustrate: (1) Raisah is a local female figure who struggles hard to develop renewal ideas through education; (2) Raisah's struggle since 1935, to develop education in Mata Air, received resistance from traditional Islamic groups, because politically this region was controlled by traditional Islamic groups under the auspices of the Tarbiyah Islamiah Union (PERTI); (3) The ups and downs of national politics also influenced the ups and downs of Raisah's struggle in its reform mission; (4) In an effort to develop his renewal ideas, Raisah has several strategies to control internal conflicts between groups in this region, even though Raisah is actually a figure who cannot be compromised and has a hard temper.

Keywords: *Struggle; Marginal Women; Local politics; Education*

Abstrak

Penelitian ini, bertujuan untuk menggambarkan usaha-usaha Raisah sebagai seorang tokoh perempuan lokal dalam mengembangkan paham pembaharuan di Mata Air dan sekitarnya, terutama di bidang pendidikan. Di samping itu, penelitian ini juga ingin menjelaskan tempat dan posisi Raisah dalam dinamika politik lokal dari tahun 1930-an sampai Orde Baru. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang dipadukan dengan metode *life story* atau biografi. Hasil Penelitian menggambarkan: (1) Raisah adalah seorang tokoh perempuan lokal yang berjuang keras untuk mengembangkan ide-ide pembaharuan melalui jalur pendidikan; (2) Perjuangan Raisah sejak tahun 1935, untuk mengembangkan pendidikan di Mata Air mendapatkan perlawanan dari kelompok Islam tradisional, karena secara politis wilayah ini dikuasai oleh kelompok Islam tradisional yang bernaung di bawah Persatuan Tarbiyah Islamiah (PERTI); (3) Pasang surut perpolitikan nasional juga mempengaruhi pasang surut perjuangan Raisah dalam misi pembaharuannya; (4) Dalam usaha mengembangkan ide-ide pembaharuannya, Raisah memiliki beberapa strategi untuk mengendalikan konflik internal antar kelompok di wilayah ini, meskipunsebetulnya Raisah adalah seorang sosok yang tidak bisa diajak kompromi dan berwatak keras.

Kata Kunci: Perjuangan; Perempuan Marginal; Politik lokal; Pendidikan

PENDAHULUAN

Politik merupakan topik yang selalu mendapatkan perhatian khusus untuk diperbincangkan dalam berbagai skala. Bahkan dalam sebuah negara, politik menjadi isu utama yang selalu dibahas oleh berbagai kalangan. Dalam sistem dan struktur perpolitikan di Indonesia, dinamika politik lokal tidak terlepas dari dinamika politik nasional. Kegiatan politik di tingkat nasional dan lokal umumnya saling mempengaruhi satu sama lainnya. Meskipun demikian, pada tingkat lokal permasalahan politik memiliki irama dan kekhasannya masing-masing. Hal ini dimungkinkan oleh kondisi sosial budaya dan faktor-faktor lainnya dari daerah tersebut. Menurut Geertz, keanekaragaman pemahaman terhadap ajaran agama merupakan penyebab perbedaan dalam memahami dan menginterpretasi sumber-sumber pemahaman tersebut, dapat melahirkan berbagai paham atau aliran keagamaan (Saifuddin, 2014; Syaifuddin, 2006). Di Indonesia, khususnya di Minangkabau, perbedaan pemahaman ajaran agama Islam terjadi antara ulama pembaharu yang terhimpun dalam Muhammadiyah dan ulama tradisional dalam Perti.

Muhammadiyah berdiri di Yogyakarta tepatnya pada 18 November 1912 yang dipelopori oleh Kiyai Haji Ahmad Dahlan. Pendirian Muhammadiyah bertujuan untuk melakukan pemurnian pemahaman dan praktek ibadah umat Islam Indonesia yang masih bercampur dengan budaya lokal dan sinkretik, mengubah proses pemahaman Islam yang bersifat mistik dan parsial menuju pola pemahaman yang rasional dan holistik (Abdullah, 2010). Perjuangan Muhammadiyah juga dilakukan melalui gerakan-gerakan perempuan, seperti 'Aisyiyah yang berdiri pada 19 Mei 1917 oleh Nyai Ahmad Dahlan yang merupakan organisasi perempuan persyarikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah mulai berkembang di

Minangkabau pada tahun 1925 tepatnya di Sungai Batang Maninjau yang dibawa oleh Abdul Karim Amrullah, sedangkan 'Aisyiyah didirikan dua tahun setelahnya oleh Fatimah, istri A.R Sutan Mansur.

Orang-orang Minangkabau yang bergabung dengan Muhammadiyah maupun 'Aisyiyah, turut terpanggil rasa tanggung jawabnya untuk mengembangkan paham yang diyakininya dalam masyarakat melalui berbagai cara, baik melalui ceramah, diskusi, orasi mimbar, tabligh akbar dan pendidikan di sekolah. Salah satu dari mereka ialah Raisah yang mengembangkan paham pembaharuan di Mata Air khususnya Seberang Padang melalui Sekolah Islam Mata Air (SIMA) yang didirikannya pada tahun 1935. Sekolah ini dia dirikan setelah dia pulang dari perantauannya ke Bengkulu sejak tahun 1918. Selama merantau ke Bengkulu, Raisah mendirikan sekolah dan menjadi anggota serta pengurus 'Aisyiyah, bahkan Raisah pernah mengikuti Pertemuan Organisasi Perempuan 'Aisyiyah di Yogyakarta pada tahun 1931. Setelah memperoleh banyak ilmu pengetahuan melalui organisasi ini, Raisah sering berfikir tentang kondisi di kampung halamannya.

Setelah Indonesia merdeka, partai-partai politik mulai bermunculan dengan berbagai macam latar belakang, ada partai politik yang berangkat dari organisasi pergerakan dan ada dari organisasi sosial, namun berbeda dengan Muhammadiyah yang tetap bertahan sebagai organisasi sosial yang bergerak sesuai dengan tujuan pendiriannya, tapi juga tidak dipungkiri sebagian anggota Muhammadiyah bergabung dengan partai politik Masyumi (Ramadhani, 2019). Pertarungan perbedaan paham antar tokoh juga meluas kepada pertarungan antar partai politik. Melalui partai politik, hubungan antara elit dengan pemerintah setempat menjadi lebih lancar terutama dalam hal-hal menetapkan kebijakan, aturan atau memperoleh

perizinan. Selain itu, kuantitas massa pendukung menjadi tolak ukur eksistensi kedua paham tersebut dalam masyarakat. Pertarungan Perti dan Masyumi dalam menyebarkan hegemoninya kepada masyarakat, secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan sekolah yang dijalankan Raisah sebagai representasi kaum muda atau bagian dari orang Muhammadiyah.

Tekad dan kegigihan Raisah dalam mengembangkan pendidikan di Mata Air diakui oleh masyarakat Mata Air dan siswa-siswanya yang masih hidup hingga saat ini, bahkan oleh orang-orang yang berseberangan dengannya (golongan tua). Sikap Raisah yang tidak kenal kompromi dan cenderung keras dalam mempertahankan hal yang dianggapnya benar, sangat sulit ditemukan pada perempuan-perempuan sekarang, yang cenderung bersikap mencari aman dan arah arus deras. Perjuangan hidup Raisah berawal sejak masa pergerakan hingga Orde Baru, perjalanan politik lokal dari masa pergerakan hingga Orde Baru turut mewarnai perjalanan dan perjuangan Raisah, meskipun secara langsung Raisah tidak tergabung dalam kegiatan partai politik. Tegasnya, pengalaman perjuangan perempuan pinggiran ini dapat dikatakan sebagai representasi dari dinamika politik lokal yang sangat erat kaitannya dengan dinamika politik nasional dari masa pergerakan sampai Orde Baru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yang didukung dengan metode biografi dan *life story*. Biografi merupakan riwayat hidup tokoh yang ditulis oleh orang lain baik tokoh tersebut masih hidup atau sudah meninggal. Biografi Raisah tergolong penulisan riwayat hidup tokoh yang sudah meninggal. Menurut Kuntowijoyo sebuah biografi seharusnya mengandung 4 hal, yakni kepribadian tokoh, kekuatan sosial yang mendukung, lukisan sejarah

zamannya, keberhasilan dan perkembangan zamannya. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan dari masa kolonial hingga Orde Baru, yaitu semenjak Raisah mulai mendirikan sekolah Islam di Mata Air, hingga wafatnya. Keberuntungan dan kesempatan yang diperoleh oleh tokoh, sedikit banyaknya tokoh muncul berkat adanya faktor keberuntungan.

Penelitian dengan metode sejarah dilakukan dalam beberapa tahap, pertama tahap heuristik (pengumpulan data). Data-data penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen pribadi milik Raisah yang disimpan oleh Zaidar dan Atmini Ayang dan dari berbagai perpustakaan di Wilayah Sumatera Barat. Melalui teknik wawancara, data diperoleh dari keluarga Raisah, anggota-anggota Muhammadiyah, anggota Perti, dan 'Aisyiyah Wilayah Sumatera Barat pada umumnya, daerah Padang khususnya serta warga Mata Air yang sezaman dan mengetahui tentang Raisah. Bagi data yang diragukan dalam pengumpulan sumber, penulis melakukan kritik sumber untuk menentukan tingkat kredibilitasnya. Data yang sudah melewati proses pemeriksaan atau kritik sumber, selanjutnya diolah dengan menggunakan perspektif keilmuan sejarah. Tahap akhir dari metode sejarah adalah historiografi, yakni menuangkan hasil penelitian dalam bentuk tulisan, sehingga menjadi suatu karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Raisah dan 'Aisyiyah

Raisah lahir pada tahun 1902 di Desa Koto Kaciak tepatnya di kaki bukit dekat Pantai Air Manis Kota Padang. Ibu kandungnya bernama Pasah, dalam kehidupan sehari-hari dia kerap dipanggil *Acah*. Raisah lahir dalam keluarga yang sangat sederhana, ibunya berprofesi sebagai dukun beranak, sedangkan ayahnya berprofesi sebagai pedagang dan petani sekaligus. Dengan latar belakang yang

demikian, sulit bagi Raisah untuk memperoleh pendidikan, karena pada masa tersebut pendidikan begitu mahal bagi pribumi. Pendidikan hanya diperuntukan untuk keturunan Eropa, sedangkan bagi kalangan pribumi hanya diperuntukan untuk keluarga *ambtenaar*, bangsawan dan tokoh terkemuka.

Walaupun tidak mendapatkan pendidikan formal melalui sekolah-sekolah Belanda, tekad kuat Raisah untuk mendapatkan pendidikan tidak padam. Raisah menempuh pendidikan dasarnya melalui pendidikan keluarga dan pendidikan surau. Pendidikan surau merupakan pendidikan non formal di Minangkabau, yang telah banyak melahirkan tokoh-tokoh bangsa. Di surau mereka diajarkan membaca al-Qur'an, menulis arab dan latin, membaca, berhitung dan lainnya. Kehidupan Raisah kecil tidak berbeda dengan anak-anak seusianya, malam hari Raisah belajar di surau keluarga dan siang harinya pergi ke sawah dan ladang untuk membantu kedua orang tuanya. Aktifitas belajar dan membantu orang tua terus dilakukan oleh Raisah dalam kehidupan sehari-harinya, sampai dia dijodohkan oleh orang tuanya. Setelah menikah pada usia 16 tahun Raisah dibawa merantau oleh suaminya yang seorang pedagang meninggalkan kampung halaman mengikuti suaminya ke Bengkulu.

Raisah berdagang di dekat toko Hasanuddin (Hasan Din) salah satu Consul Muhammadiyah di Bengkulu (Zaidar, 2017). Melalui tetangga dagangannya tersebut Raisah mulai mengenal paham pembaharuan dan bergabung dengan 'Aisyiyah sebagai orotom Muhammadiyah. Pada organisasi 'Aisyiyah, Raisah bergerak dalam bidang pendidikan. Tahun 1931, Raisah mendapat kesempatan untuk turut menghadiri kongres Muhammadiyah ke-20 di Yogyakarta sebagai perwakilan dari 'Aisyiyah Lebong Tandai. Sepulang dari kongres, semangat Raisah sebagai seorang pergerakan semakin meningkat yang

terlihat dalam gerakan-gerakan yang dilakukannya di bidang pendidikan. Suatu saat dia berfikir dan berkeinginan untuk membangun sekolah di kampung halamannya Mata Air (Padang). Niat baik tersebut didukung oleh suaminya meskipun Raisah tidak langsung meninggalkan tanah rantau di tahun itu juga. Raisah tetap melanjutkan usahanya berdagang kain di Bengkulu bersama sang suami untuk mengumpulkan uang sebagai modal yang akan dibawa pulang. Laba dari hasil dagang tersebut, sedikit demi sedikit ditabung oleh Raisah untuk persiapannya pulang kampung dan biaya membangun sekolah agama yang sudah dicita-citakannya. Setelah Raisah merasa memiliki persiapan yang cukup untuk membangun sekolah di kampung halamannya, dia mulai bersiap-siap untuk kembali ke Padang.

Raisah Dalam Dinamika Politik Lokal

a. Raisah Pada Masa Kolonial

Pada masa kolonial, khususnya pada tahun-tahun terakhir kejatuhan kekuasaan Belanda, sekolah dan politik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sekolah-sekolah tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan dalam arti sempit, melainkan juga sebagai wadah pendidikan politik dalam arti luas. Demikian digambarkan oleh Taufik Abdullah dalam bukunya *"Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatera"* (1971). Hal yang sama juga dilakoni oleh seorang perempuan yang bernama Raisah, sentimen pergerakan semakin tegambar pada jiwa Raisah, terutama ketika Raisah telah mendapatkan kesempatan mengikuti Kongres Muhammadiyah dan 'Aisyiyah ke-20 di Yogyakarta pada tahun 1931.

Raisah meninggalkan tanah "Batavia kecil" atau Bengkulu dengan membawa uang dan harta kekayaan yang sudah dikumpulkannya selama dua

puluh tahun untuk membangun sekolah agama yang sudah dicita-citakannya. Sesampainya di Mata Air Padang, tepatnya tanggal 25 Juni 1934, Raisah tinggal di rumah gadang kaum bersama suami dan keluarga besar ibunya. Keluarga Raisah pindah dari Koto Kaciak kaki Bukit Air Manis, Batu Malin Kundang, setelah membeli sebidang tanah di Mata Air, kemudian mereka membangun Rumah Gadang, tepatnya di jalan Sutan Syahrir sekarang (Yusnaida & Atmini, 2017). Setelah menetap kembali di tanah kelahirannya, Raisah menyaksikan sendiri keterbelakangan yang dialami oleh masyarakat Mata Air pada khususnya dan Seberang Padang pada umumnya, terutama dalam bidang pendidikan karena belum terdapat satupun sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah agama.

Kegelisahan Raisah semakin membara ketika dia mengamati orang kampungnya terperangkap pada pemikiran-pemikiran yang dianggap Raisah penuh dengan tahayul dan kemistikan. Paham yang bersifat sinkretis ini sangat berlawanan dengan pemikiran Raisah yang sudah dipengaruhi oleh ide-ide pembaharuan melalui Muhamadiyah dan 'Aisyiyah. Di Mata Air terdapat tiga surau tarekat yang beraliran Islam tradisional; *Surau Angku Sawah*, *Surau Gadang*, dan *Surau Mato Aia*. Ketiga Surau ini berjarak tidak lebih satu kilo meter. *Surau Sawah* memiliki paham tarekat Syatariyah yang berinduk ke Ulakan Pariaman. Sekalipun tidak keseluruhan surau ini menganut dan mengamalkan ajaran tarekat, namun pada prinsipnya mereka mengakui kebenaran tarekat yang dipandang mu'tabarah (Koto, 2012). Sedangkan Muhammadiyah mengembangkan Islam bersumber pada al-Qur'an dan Hadist yang dianggap berlawanan dengan aliran tarekat. Dengan demikian, apa yang terjadi di

Mata Air sangat bertentangan dengan paham yang diyakini Raisah.

Sebagian besar ulama dan Kyai di Kampung Seberang Padang tergabung ke dalam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), termasuk *Pakih Nambi*, Kepala Kampung Seberang Padang tahun 1934. Kuatnya pengaruh ulama tradisional di Kampung Seberang Padang terlihat dengan banyaknya ulama **tradisional** ini menduduki posisi penting dalam pemerintah lokal, baik di tingkat nagari maupun kampung dan dusun. Keseluruhan elit *nagari* ini, selalu berusaha untuk menghambat dan melarang masuknya ideologi pembaharuan terutama yang dibawa oleh Muhamadiyah dan 'Aisyiyah. Situasi ini menjadi sebuah tantangan berat bagi seorang perempuan yang bernama Raisah.

Menyikapi hal ini, Raisah tidak kehilangan akal. Raisah mencoba membentuk komite atau panitia pembangunan sekolah, yang terdiri dari orang-orang terdekat Raisah terlebih dahulu. Komite tersebut terdiri dari lima orang, yaitu: *M. Yunus* sebagai ketua panitia, *Hasan* sebagai sekretaris, *Ma'akhir* sebagai bendahara, *Salim dan Rasyidin* sebagai pembantu. Selain komite pendirian sekolah merupakan orang-orang yang memiliki keinginan pembaharuan bersama Raisah, terdapat juga beberapa anggota 'Aisyiyah yang berasal dari Pasar Gadang, yang ketika itu merupakan pusat kegiatan ekonomi di kota Padang.

Keseluruhan dana persiapan pendirian sekolah dan biaya hidup guru ditanggung oleh Raisah. Untuk menyalurkan agar Raisah mendapatkan izin dari Kepala Kampung, Raisah menamakan sekolah yang akan dibangun tersebut dengan nama Sekolah Islam Mata Air (SIMA). Setelah mendapat tanda tangan Pakih Nambi, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1935, SIMA resmi didirikan. Pada awalnya,

sekolah bertempat disebuah rumah sewa yang dibiayai oleh Raisah. Sekolah tersebut tidak sedikitpun berlabel Muhammadiyah, melainkan bernama Sekolah Islam Mata Air. Sekolah dijalankan dalam dua kali sehari, yaitu sekolah umum pada pagi hari dan sekolah agama pada sore harinya. Pada sekolah tersebut Raisah bertindak sebagai ketua pengurus, yang mencari guru dan biaya operasional sekolah.

Strategi lain yang dilakukan Raisah dalam menjalankan sekolah ini, Raisah merekrut tenaga guru dari orang-orang Muhammadiyah yang mengajar di sekolah-sekolah kota Padang dan luar kota Padang, diantaranya adalah Zamzami Samah dari Maninjau, Usman Zakaria dari Teluk Bayur dan A. Aziz dari Andalas. SIMA tidak jarang mendapat gangguan dari masyarakat, ketika kaum tua mengetahui bahwa guru-guru yang mengajar di SIMA adalah orang-orang yang berpaham pembaharuan. Raisah juga tidak habis akal, kemudian Raisah mengangkat *Angku Anas* (ayah kandung Azwar Anas) sebagai ketua komite. *Angku Anas* merupakan orang yang disegani di masyarakat, karena jabatannya sebagai *ambtenaar* (Pegawai Belanda). Berkat kerja sama yang baik di antara sesama pengurus SIMA, dan juga atas bantuan dari salah satu murid Tafsir al Qur'an, Djamilah, tahun 1937 komite SIMA membeli tanah Djamilah dengan harga separuh wakaf (Surat Kabar Tahun 1952 Dengan Judul "Tanah SR 26 Kepunyaan SIMA"). Komite ini bertugas mengumpulkan dana untuk membeli tanah tersebut dengan menjalankan kupon sumbangan ke wilayah Pauh, Nipah, Andalas, Teluk Bayur, serta ke PJKA Padang. Namun, panitia sepakat tidak menjalankan kupon tersebut di wilayah di Mata Air, dengan alasan tidak ingin terjadi permasalahan dengan masyarakat mata Air (Manuskrip Sekolah Islam Mata

Air. Surat Tanggapan nomor E.1/022/M.1/'78. Tanggal 15 September 1978).

Setelah dana terkumpul, Djamilah menjual tanah tersebut dengan harga setengah wakaf, yaitu seharga 800 rupiah dari harga sesungguhnya 1.600 rupiah Hindia Belanda (Zaidar, 2017). Tanah wakaf yang seluas 19.000 m², hanya dibangun gedung SIMA yang luasnya kira-kira 160 m², sisa lain dari lahan tersebut digarap untuk dijadikan ladang bagi SIMA. Ladang tersebut diolah dan digarap oleh Raisah sendiri. Tanaman yang ditanam Raisah berupa sayur-sayuran dan buah-buahan. Setiap tanaman yang diambil dari ladang tersebut diuangkan dan dimasukkan kedalam kas SIMA, bahkan rumput liar yang diambil oleh orang Mata Air untuk makan ternak, dimasukkan ke dalam kas infak, dengan pembukuan dan manajemen yang rapi.

Materi pembelajaran yang diberikan di SIMA tidak hanya pelajaran agama, baca tulis, dan berhitung saja, melainkan juga materi pembelajaran yang bersifat umum lainnya. Kurikulum yang digunakan mengikuti kurikulum sekolah pemerintah, dan sekolah desa. Mata pelajaran yang diberikan, antara lain; Bahasa Indonesia, bercakap-cakap, bahasa daerah, membaca latin, membaca Arab, berhitung, menulis arab dan latin, menggambar, bernyanyi, pekerjaan tangan, gerak badan, kebersihan dan kesehatan, ilmu bumi, sejarah, ilmu tentang tumbuhan, hewan dan manusia, pekerjaan wanita (menyulam, menjahit, memasak), ilmu alam, kerajinan. Pada sekolah sore diajarkan masalah keagamaan seperti, budi pekerti, hadist, tafsir, akhlak, ibadah, al-Qur'an, keimanan, muhadarah, tarekh, dan bahkan bersajak.

Sejak berdirinya gedung SIMA di atas tanah wakaf, secara berangsur

tanah wakaf tersebut menjadi pusat kegiatan pengembangan paham pembaharuan di Mata Air, Kampung Seberang Padang. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak hanya menjalankan pendidikan, akan tetapi juga mengadakan wirid pengajian, tabligh akbar, dan tidak jarang pula Raisah mengundang ulama-ulama terkenal Muhammadiyah untuk mengisi pengajian di SIMA. Jamaah pengajian SIMA pada umumnya berasal dari Seberang Padang, Pasar Gadang, Pauh, Kuranji dan Teluk Bayur, bahkan ada beberapa dari Bukittinggi. Raisah memiliki kedekatan dengan beberapa ulama terkenal di Sumatera Barat seperti Mukhtar Yunus, yang lebih dikenal dengan Buyuang Ketek. Akibatnya, SIMA menjadi terkenal dan banyak dikunjungi oleh anggota pengajiannya. Setiap pertemuan tidak kurang dari 150 orang peserta bahkan jika hari-hari besar bisa mencapai 300 orang.

Melihat kondisi ini, menimbulkan kekhawatiran di kalangan kaum tua dan pendukung Perti di Mata Air, karena paham pembaharuan sudah mulai berkembang dan memiliki banyak pengikut, serta sudah mulai diterima masyarakat mata Air. Meskipun, SIMA tidak secara terang-terangan berlabelkan Muhammadiyah, namun seluruh aktifitas dan orang-orang yang berada di dalam tubuh SIMA adalah orang-orang yang memiliki paham pembaharuan. Akhirnya, A.R. ST. Malano dan Dt. Kayo, yang merupakan tokoh elit dari Perti, mencoba menghasut dan mengadakan Raisah kepada Kepala Kampung Seberang Padang, *St. Sudin*, bahwa Raisah adalah seorang pergerakan yang pernah menentang pemerintahan Hindia Belanda di Bengkulu, dan sudah pernah dibuang atau diasingkan sampai tiga kali. Menyikapi laporan tersebut, Kepala

Kampung Seberang Padang, *St. Sudin*, membawa kasus Raisah ke pengadilan. Akhirnya, Raisah divonis penjara selama 15 hari, terhitung mulai tanggal 28 Desember 1940.

Keluar dari penjara, Raisah menemukan SIMA telah diambil alih oleh St. Malano, Dt. Kayo dan masyarakat Mata Air. Guru-guru SIMA yang memiliki paham pembaharuan diganti. Namun, sekolah tersebut bertahan di tangan mereka hanya beberapa bulan saja dan akhirnya, SIMA terhenti selama dua tahun. Melihat tidak ada tindak lanjut dari masyarakat Mata Air terhadap sekolah tersebut, Raisah kembali melanjutkan SIMA, dengan bantuan dari rekan-rekan di Muhammadiyah maupun 'Aisyiyah di Kota Padang. Sekolah dijalankan kembali seperti sebelumnya, yaitu: sekolah umum di siang hari dan sekolah agama di sore hari. Guru-guru direkrut kembali dari guru-guru sekolah Muhammadiyah. Hal ini berlangsung sampai pada era kemerdekaan. Ketika masa Jepang, sekolah tidak mendapat gangguan yang berarti, karena SIMA semata-mata bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan. Raisah sendiri mencoba untuk menyesuaikan diri dengan pemerintahan, tanpa memperlihatkan bahwa dia berafiliasi pada partai politik tertentu.

b. Raisah dan SIMA Masa Kemerdekaan dan Orde Lama

Pada tanggal 3 November 1945, wakil presiden Moh. Hatta mengeluarkan Maklumat yang berisikan tentang anjuran pemerintah kepada Rakyat Indonesia untuk mendirikan Partai politik. Era ini dikenal dengan era bangkitnya kembali partai-partai politik, yang selama pemerintahan Jepang sempat dibekukan. Masing-masing organisasi sosial pendidikan, politik, dan keagamaan yang sudah berkembang pada masa

pergerakan, meleburkan diri sesuai dengan paham dan alirannya masing-masing, termasuk yang didasari agama. Menyikapi situasi ini, Perti, yang dulunya bergerak dibidang pendidikan Islam tradisional, memproklamirkan diri sebagai partai politik, sedangkan Muhammadiyah yang berseberangan dengan Perti dalam paham keagamaan tetap bergerak sebagai organisasi sosial-agama namun menyatakan diri sebagai pendukung Masyumi. Selain Muhammadiyah, Masyumi juga didukung oleh Nahdatul Ulama dan organisasi Islam lainnya, kecuali Perti. Menurut Buya Syafe'i Maarif, tidak bergabungnya Perti ke dalam Masyumi barangkali disebabkan oleh kondisi lokal Sumatera Barat, unsur modernis Islam begitu dominan dalam pembentukan partai baru ini, sedangkan kelahiran Perti pada tahun 1930 adalah reaksi terhadap gerakan kelompok modernis di Sumatera Barat.

Masyumi dan Muhammadiyah memiliki kedekatan yang lebih baik dibanding kedekatan Masyumi dengan NU dan PSII, yang pada akhirnya memilih memisahkan diri dengan Masyumi. Kedekatan Masyumi dan Muhammadiyah digambarkan oleh Hamka dalam pernyataan "*hubungan Muhamadiyah dan Masyumi yang sungguh-sungguh sangat sulit dipisahkan. Ibarat kuku dan daging, keduanya saling membutuhkan dan tak mungkin terpisah*". Selain itu terdapat jargon-jargon yang muncul dari kedekatan tersebut seperti "*berjuang dengan Masyumi dan beramal lewat Muhammadiyah*"(Nuryanti, 2011).

Munculnya Perti sebagai Partai Politik, karena para tokoh organisasi ini merasa berkepentingan untuk itu. Dengan mengangkat diri sebagai partai politik, mereka merasa semakin kukuh mempertahankan keagamaannya dari semua serangan kaum modernis, seperti sebelumnya. Secara moral, keinginan

seperti itu memang dapat diwujudkan. Kedekatan mereka dengan pemerintah, tidak saja membawa dampak rasa aman menjalankan keyakinan dan paham keagamaannya, tetapi juga mampu mengangkat pamor di gelanggang perebutan pengaruh di kalangan umat beragama.

Senada dengan itu, ketua 'Aisyiyah sekaligus wakil perempuan yang duduk di legislatif daerah, Chadijah Idrus mengatakan bahwa tanpa partai politik kekuasaan akan susah diraih, dan akan berdampak pada tujuan Muhammadiyah dalam menegakkan ajaran Islam pada skala lokal maupun nasional. Dalam menanamkan ajaran Islam secara total, masyarakat Minangkabau tampaknya sudah diarahkan untuk meraih kekuasaan (Nuryanti, 2011). Dengan kedua organisasi keagamaan tersebut mulai ikut mengambil peran dalam partai politik baik secara langsung ataupun tidak langsung. Konflik keduanya tidak lagi hanya sebagai dua golongan yang berbeda paham dalam agama Islam, tetapi sudah mulai bergerak kepada ranah politik dan kekuasaan. Jumlah massa pendukung Perti dan Masyumi menjadi tolak ukur berkembang dan pasang surutnya kedua paham yang diusung oleh Perti dan Masyumi yang didominasi oleh Muhammadiyah. Baik Perti maupun Muhammadiyah sebagai pendukung Masyumi, berlomba-lomba mengembangkan eksistensinya dalam masyarakat melalui jama'ah tabligh dan wirid pengajian dengan menarik masyarakat yang berada di masing-masing pihak.

Eksistensi Muhammadiyah semakin dirasakan di Mata Air. Akibatnya, setelah kemerdekaan, konflik Perti dan Muhammadiyah semakin terlihat di Mata Air. Dengan resminya berdiri Muhammadiyah dan 'Aisyiyah Ranting Mata Air pada 5

November 1945, keterlibatan orang-orang 'Aisyiyah dalam SIMA dibuktikan, ketika pengurus SIMA juga menjadi pengurus 'Aisyiyah ranting Mata Air. Tidak adanya lagi larangan bagi Muhammadiyah untuk berkembang di Mata Air khususnya dan di kampung Seberang Padang umumnya, membuat Raisah lebih leluasa dalam membawa nama Muhammadiyah maupun 'Aisyiyah dalam setiap kegiatan SIMA. Mulai saat itu, tidak jarang pula Raisah mengundang ulama-ulama besar dari Muhammadiyah Sumatera Barat seperti A.R Sutan Mansur dan Mochtar Yunus untuk menghadiri kegiatan musyawarah, dan pertemuan-pertemuan besar lainnya di Mata Air. Ulama-ulama Muhammadiyah tersebut, menjadi pengisi ceramah pengajian tafsir Alqur'an di SIMA secara rutin dan seiring dengan itu, sekolah SIMA mulai bergandengan dengan nama S. R 'Aisyiyah. Semakin banyaknya penganut paham pembaharu di Mata Air, turut mempengaruhi dukungan untuk Masyumi di Mata Air, karena sebahagian besar anggota Masyumi di Sumatera Barat adalah anggota Muhammadiyah.

Hubungan baik Raisah dengan Buyuang Ketek, kakak kandung dari Mochtar Yunus, turut mendekatkan hubungan Raisah dengan ulama kondang tersebut. Bersama *Buyuang Ketek*, Mochtar Yunus sering berkunjung ke sekolah yang dijalankan oleh Raisah (Kahin, 2008; Kato, 2005). Hal ini menjadikan SIMA dikenal oleh masyarakat tidak hanya di Seberang Padang, namun juga oleh tetangganya seperti Pauh, Kuranji, Pasar Gadang, Alang Laweh, dan Teluk Bayur. Selain itu, *Buyuang Ketek* juga mempercayakan putri sulungnya, *Basyiah*, untuk belajar agama dengan Raisah sambil menjadi guru di SIMA dan mengurus keperluan Raisah. Sejak

itu *Basyiah* tinggal bersama Raisah dan mengurus SIMA hingga akhir hayatnya.

Kedekatan SIMA dengan 'Aisyiyah membuat kaum tua dan beberapa masyarakat Mata Air yang berada dipihak Perti tambah khawatir, jika nanti Raisah akan menjadikan SIMA sebagai pusat segala kegiatan Muhammadiyah dan bahkan menjadikan SIMA sebagai milik Muhammadiyah (Kahin, 2008). Gunjangan hilir mudik ini kian memuncak seiring berdirinya 'Aisyiyah dan sikap Raisah yang pro-aktif terhadap Muhammadiyah, ditambah lagi dengan kondisi tanah wakaf SIMA yang hanya diisi oleh gedung SIMA dan kebun yang dikelola oleh orang-orang 'Aisyiyah. Sikap Raisah tidak sedikitpun memberi celah kepada orang-orang kontra-Muhammadiyah untuk terlibat dalam kepengurusan SIMA yang dipimpinnya.

Akhirnya kaum tua yang memiliki bendera Perti, menyebarluaskan berita bahwa tanah wakaf tersebut akan menjadi milik Muhammadiyah bukan milik orang Mata Air. Maka beberapa kaum tua dan pendukung Perti, diantaranya Dt. Kayo, St. Malano, dan kaum tua Kampung Seberang Padang mulai khawatir dan berkeinginan mengambil alih kepengurusan tanah wakaf tersebut dengan memanfaatkan musibah runtuhnya gedung SIMA pada 8 Mei 1951 akibat badai. Akhirnya, Dt. Kayo dan St. Malano mengambil alih tanah wakaf dan puing-puing reruntuhan sekolah tersebut (*Surat Kabar*, 1956).

Dengan mengaku sebagai pembina tanah wakaf SIMA, St. Malano dan Dt. Kayo didukung oleh Kaum Tua dan beberapa masyarakat kampung Seberang Padang, memberikan sebagian tanah wakaf tersebut kepada pemerintah atas izin St. Sudin selaku Kepala Kampung untuk mendirikan sekolah Rakyat. Pemerintah menyambut baik

usul Kepala Kampung Seberang Padang, mengingat belum adanya sekolah negeri di Mata Air. Menyikapi rencana tersebut, dibentuklah Panitia Pendiri Sekolah Rakyat Mata Air yang akan mengelola jalannya pembangunan sekolah rakyat tersebut. Selain mendapatkan bantuan dari pemerintah sebanyak Rp. 134.000 (*Harian Haluan*, 8 Mei 1952), dana pembangunan sekolah juga berasal dari sumbangan rakyat Mata Air yang dijalankan oleh Panitia Pendiri Sekolah Rakyat Mata Air, dengan ketuanya A.R St. Malano, Bendahara Dt. Kayo, dan Tata Usaha M.B Radjo Bongsu. Nama-nama tersebut terdapat pada kwitansi sumbangan pembangunan sekolah rakyat tersebut.

Dengan diambil alihnya sebahagian tanah wakaf SIMA oleh pihak-pihak pendukung Perti, maka orang-orang dari Muhammadiyah dan Masyumi akan kehilangan sebahagian asetnya di Mata Air. Selain itu, Raisah juga kehilangan sekolah tempat ia menjalankan pendidikan Islam pembaharuan di Mata Air. Raisah memindahkan murid-muridnya belajar ke bawah kandang rumah gadang kaumnya, tepatnya berada di jalan sutan Syahrir, Mata Air. Hal ini tidak mematahkan niat belajar murid-murid SIMA, terbukti dengan jumlah murid yang dimiliki Raisah saat itu, sampai berjumlah 300 orang.

Setelah kehilangan gedung sekolah, gangguan dari orang-orang yang tidak menyukai SIMA terus berlanjut. Sekolah darurat SIMA yang berada di bawah kandang hanya berlantai tanah, terus menjalankan proses belajar mengajar. Tempat belajar di bawah kandang tersebut selalu diganggu oleh orang-orang yang tidak senang dengan Raisah dan Muhammadiyah. Tidak jarang, di tempat belajar tersebut ditemukan kotoran manusia, dan bau buang air

kencing yang dilakukan oleh orang-orang suruhan dari kelompok yang berseberangan tersebut di atas meja guru dan siswa. Kegigihan Raisah dalam menjalankan dan mempertahankan sekolah tersebut membuat sikap kagum murid-murid Raisah, termasuk sikap dari orang-orang yang tidak menginginkan sekolah tersebut masih berjalan (Kahin, 2008).

Gangguan yang terus menerus, membuat Raisah sadar bahwa tidak mungkin untuk terus melanjutkan sekolah tersebut di bawah kandang. Kemudian pada tahun 1951, Raisah menemui Wedana Abdul Moeloek, untuk memperoleh izin membangun gedung sekolah. Namun, perjuangan Raisah tidak berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan. Raisah ternyata tidak memperoleh izin mendirikan sekolah dari Wedana Abd. Moeloek tersebut. Kemudian, Raisah berinisiatif untuk menyewa sebuah bangunan bekas pemerintahan Jepang yaitu pabrik tembok, kompleks Cendana sekarang, tempat berdirinya Masjid Darussalam sekarang. Untuk membantu biaya sewa, setiap pulang sekolah, setiap siswa membantu membawa 5 buah tembok (Kahin, 2008).

Ironinya, setelah Sekolah Rakyat selesai dibangun, Wedana Abd. Moeloek memerintahkan kepada kepala kampung Seberang Padang, agar para wali murid sekolah partikulir Mata Air (maksudnya siswa SIMA) untuk memindahkan anak mereka pada sekolah Rakyat yang baru dibangun tersebut (Surat 1 November 1952, nomor 4435117). Pada harian haluan bertanda Padang 8-5 tahun 1952, pemerintah kota Padang menjelaskan mengenai perihal pembangunan Sekolah Rakyat tersebut. Dalam surat kabar tersebut dinyatakan bahwa sebelumnya di Mata Air telah ada sekolah partikulir, yang belajar di gedung sewa. Mereka sudah

beberap kali mengalami perpindahan lokasi belajar, serta juga dinyatakan, siswa yang belajar di sekolah tersebut berjumlah sebanyak 300 orang. Hanya saja, dalam kolom berita tersebut tidak disebutkan bahwa sekolah partikular tersebut adalah Sekolah Islam Mata Air, dan siswa tersebut adalah siswa dari SIMA, akan tetapi sekolah partikular yang ada satu-satunya di Mata Air adalah sekolah SIMA, maka dipastikan sekolah tersebut adalah sekolah dibina oleh Raisah. Karena Raisah tidak diperbolehkan oleh Wedana membangun sekolah kembali, ketika itu Raisah merasa habis sudah segala usahanya. Akhirnya raisah tidak mampu mempertahankan sebanyak 313 orang siswa dari kelas satu sampai kelas enam tersebut.

Meski demikian, Raisah tidak pernah putus asa, dia tidak ingin sekolah yang didirikan dengan susah payah dibiarkan mati begitu saja. Raisah kembali menjalankan sekolahnya di bawah kandang rumah gadang keluarga, meskipun murid-muridnya tidak sebanyak yang dahulu lagi. Sekolah dan proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan lancar dengan gurunya Basyiah dan beberapa dari 'Aisyiyah lainnya. Murid-murid yang bertahan belajar, pada umumnya adalah anak-anak yang orang tuanya 'Aisyiyah dan Muhammadiyah.

Kemenangan Masyumi pada pemilu pertama merupakan kemenangan pula bagi Muhammadiyah, karena sebagian besar anggota Masyumi di Sumatera Barat berasal dari Muhammadiyah. Kemenangan ini pun membawa angin segar bagi sekolah SIMA dan Raisah, khususnya dalam membangun kedekatannya dengan pemerintahan daerah. Pada tahun 1955 Sekolah Islam Mata Air (SIMA) telah terdaftar pada kantor inspeksi Pendidikan Agama Kotamadya Padang dengan Surat keterangan Kantor

departemen agama kota madya Padang No.: M.C.9/3-4/26/78. Setelah terdaftar di kantor Inspeksi Pendidikan Agama Kotamadya Padang, Raisah kembali melanjutkan rencananya untuk membangun gedung SIMA ditinjau wakaf SIMA tersebut. Rencana tersebut tentu didukung oleh orang-orang Muhammadiyah yang menjadi perwakilan Masyumi di pemerintahan daerah. Pada 5 November 1956, dimulai peletakan batu pertama pembangunan sekolah tersebut oleh Ibu Khadijah Idrus (Nuryanti, 2011) pengurus 'Aisyiyah Ranting Mata Air, karena pengurus SIMA juga sekaligus pengurus 'Aisyiyah Mata Air. Untuk peralatan perkayuan dan tenaga tukang dibantu oleh orang-orang dari Pauh, yang dipelopori oleh Buyuang Ketek atau Mochtar Yunus.

Pada tanggal 1 Januari 1958, gedung sekolah SIMA dibangun dengan ukuran 21m x 9m, dilengkapi dengan ruang kantor seluas 5m x 7m. Anak-anak yang belajar di bawah kandang, dipindahkan ke gedung baru bertingkat dua meskipun belum sempurna. Pada tanggal 30 Agustus, pengerjaan gedung sempat terhenti, karena kekurangan dana untuk pembangunan. Untuk melanjutkan pembangunan kembali, Raisah menjalankan sumbangan ke rumah-rumah karib kerabat, anggota 'Aisyiyah, Muhammadiyah, dan juga ke kantor-kantor pemerintah. Dalam menjalankan sumbangan tersebut Raisah berangkat dari pagi sampai sore dengan berjalan kaki, dengan membawa buku catatan dan surat pengantar dari Dinas Sosial Kota Padang.

Setelah gedung SIMA yang baru berdiri, Raisah kembali menjalankan kegiatan perkumpulan 'Aisyiyah. Dengan kemenangan Masyumi di pentas politik, SIMA dari hari ke hari memperlihatkan perkembangannya yang semakin pesat. Gedung SIMA baru yang terdiri dari dua tingkat, setiap

lebaran dan hari-hari besar Islam selalu dipenuhi oleh jamaah dan pengunjung. Jamaah yang datang tidak hanya dari kampung Mata Air dan Seberang Padang saja, akan tetapi dari berbagai daerah di Kota Padang seperti Pauh, Kuranji, Alang Laweh, Pasa Gadang dan Teluk Bayur. Hal ini terjadi karena Raisah sering membawa ulama-ulama terkenal dari Muhammadiyah sebagai imam dan penceramah, Mochtar Yunus merupakan salah satu ustadz Muhammadiyah yang kerap datang dan mengisi pengajian di SIMA (Susnida, 2017). Kaum tua dan pendukung Perti yang tidak menginginkan perkembangan Muhammadiyah di Mata Air, tidak dapat berbuat banyak pada masa ini, karena banyaknya pendukung atau anggota muhammadiyah yang duduk di pemerintahan sebagai perwakilan Masyumi.

c. Raisah dan SIMA Masa Orde Baru

Orde Baru merupakan sebuah rezim yang unik dalam perjalanan sejarah Bangsa Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan semasa berkuasa membekas dalam kepala rakyat Indonesia yang kemudian menjadi memori kolektif setiap warga negara Indonesia. Kebijakan difusi partai politik adalah kebijakan penguasa Orde Baru yang sangat menonjol dalam perpolitikan Indonesia. Partai politik di Indonesia dikerucutkan menjadi tiga partai yaitu PDI, PPP dan GOLKAR. Kebijakan ini bertujuan agar partai-partai politik yang beraliran religius bergabung dengan PPP, yang beraliran sosialis dan nasionalis bergabung dengan PDI dan GOLKAR. Namun dalam prakteknya partai politik Islam Masyumi bergabung dengan GOLKAR. Sedangkan Muhammadiyah menarik diri dari partai politik dan tetap menyatakan diri sebagai organisasi sosial, walaupun ada beberapa kader Muhammadiyah yang bertarung dalam politik. Kemenangan GOLKAR dalam

pemilu 1971 mengantarkan sebagian anggota Perti atau golongan tua memiliki kursi kekuasaan di pemerintah, baik nasional maupun lokal. Keadaan yang demikian memberikan kesempatan bagi golongan tua untuk menduduki dan mengisi posisi penting dalam pemerintahan. Sejak 18 dan 19 Maret 1966 mereka berhasil mendirikan Lembaga Kerapatan Alam Minangkabau (LKAAM) di Minangkabau.

Mulai kuatnya kedudukan Perti dalam pemerintah lokal adalah pada masa Orde baru ini, dan sekaligus merupakan ancaman baru bagi SIMA, khususnya Raisah. Kelompok kaum tua yang sejak awalnya menentang SIMA yang dijalankan oleh Raisah dengan beberapa orang-orang 'Aisyiyah dan kelompok pembaharu, selalu berupaya untuk kesekian kalinya mengambil alih kepengurusan tanah wakaf SIMA dan menghentikan perkembangan Muhammadiyah di Mata Air, yang berpusat di SIMA. Diawali dengan tuduhan oleh beberapa kelompok tua, yang disponsori oleh Dt. Malano, Dt. Kayo dan Mazwir Pundek, menuduh Raisah memberikan tanah wakaf SIMA untuk kepentingan Muhammadiyah. Kaum tua, dengan mengatasnamakan masyarakat Mata Air, menginginkan pergantian pengurus Tanah Wakaf SIMA. Pada tanggal 30 April 1978, kelompok yang mengatasnamakan masyarakat Mata Air mengadakan rapat bersama. Dalam rapat tersebut, diputuskan untuk pembubaran pengurus SIMA yang lama dan membentuk pengurus SIMA yang baru, "Syiar Islam Mata Air" (SIMA). Surat kabar harian Haluan, tanggal 10 Mei 1978 memberitakan, rapat tersebut dihadiri sekitar 300 orang diantaranya terdapat unsur-unsur pemerintahan dari Kecamatan Padang Selatan, Bapak Kesra Drs. Ja'far Siddik mewakili Walikota KDH tk. II Kodya Padang,

dan Ir. H. Azwar Anas, Gubernur KDH Tk. I Prop. Sumatera Barat, yang mengaku sebagai ahli waris baru dari tanah tanah wakaf SIMA.

Pembentukan pengurus Syi'ar Islam Mata Air (SIMA) yang baru terdiri dari; Maswir Pundek, SH terpilih sebagai ketua pengurus, Wahid Nurdin sebagai sekretaris, sedangkan sebagai penasehat adalah H. Rakinah Anas, H.A. Rahman St. Malano, Hasan Rajo Sulaiman, K.S Dt. Kayo (*Harian Haluan*, n.d.). Karena merasa dirampas dan di kudeta oleh pihak lawan secara sepihak, Raisah tetap menjalankan kepengurusan Sekolah Islam Mata Air dan sebagai pengurus tanah wakaf SIMA. Setelah dibentuknya pejabat Pembuat Akta ikrar Wakaf sebagai Nadzir wakaf pada tanggal 24 Mei 1978, Raisah mengirim surat pendaftaran Tanah Wakaf dengan nomor surat E.1/1011/M.I/78 kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Padang Selatan untuk mendaftarkan tanah wakaf SIMA. Namun, pada tanggal 12 Agustus 1978 dikeluarkan pengumuman bahwa Tanah SIMA (syi'ar Islam Mata Air) terdaftar atas nama Rakinah Anas. Dengan demikian surat yang dikirim Raisah sejak bulan Mei tidak pernah ditindaklanjuti.

Akhirnya permasalahan tanah wakaf ini, terdapat dua versi. Pertama, surat penyerahan tanah wakaf yang ditandatangani oleh ahli waris pewakif yakni Abd. Rahim yang bergelar St. Mangkuto dan Ramani. Pada surat wakaf pertama tersebut, tertanda 27 September 1962, dikukuhkan notaris 23 Februari 1976. Dalam surat tersebut pewakif, menunjuk Raisah dan Basiah sebagai nadzir wakaf, surat ini dimiliki oleh Raisah. Pada surat versi kedua, yang dimiliki oleh Maswir Pundek, SH. tertanda 31 Desember 1977 Abd. Rahim dan Ramani menunjuk nadzir wakaf yang kedua, tidak disebutkan oleh Raisah siapa nadzir kedua itu, yang

ditunjuk oleh pewakif dalam surat tanggapan no E.1/022/M.1/78 yang ditulisnya. Namun besar kemungkinan nadzir yang ditunjuk pada surat kedua adalah Rakinah Anas. Hal ini berdasarkan kepada pengumuman yang dikeluarkan oleh kepala kantor Sub. Direktorat Agraria Kota Madya Padang tertanggal 12 Agustus 1978, yang menyatakan bahwa Rakinah telah mendaftarkan Tanah Wakaf SIMA. Dalam hal ini, berarti Rakinah adalah sebagai pemilik bukan nadzir tanah wakaf.

Menanggapi pengumuman dan ketidakberesan tersebut, tanggal 17 Oktober 1978 Raisah kemudian mengirim surat untuk membatalkan/tidak membenarkan Rakinah mendaftarkan Tanah SIMA Mata Air. Namun hal ini tidak mengubah apapun, surat yang ditulis Raisah tidak pernah sampai ke atas, selalu tersendat di jenjang bawah birokrasi. Dalam pengurusan surat-surat tersebut, selain penolakan tidak jarang Raisah dan guru Basyiah mendapat perlakuan kasar dari pemangku jabatan di pemerintah daerah. Akhirnya sampai sekarang tanah wakaf SIMA tersebut, terdaftar atas nama Rakinah Anas, orang tuanya mantan Gubernur Azwar Anas.

Sejak pemilihan pengurus SIMA yang baru pada 30 April 1978 pengurus tanah wakaf SIMA berjalan ganda, yakni pengurus SIMA yang diketuai oleh Raisah, yang sejak awal menyatakan Pengurus Sekolah Islam Mata Air (SIMA) sekaligus sebagai Nadzir wakaf SIMA sejak tahun 1937 tidak pernah mengundurkan diri. Berikutnya, pengurus SIMA (Syi'ar Islam Mata Air) yang baru dilantik atau disahkan sebagai pengurus tanah wakaf SIMA yang baru pada tanggal 30 April 1978, menamainya dengan Badan Pembinaan Sekolah Islam Mata Air. Dari data ini, jelas memperlihatkan

kerancuan. Di satu sisi menyebut SIMA dengan kependekan Syi'ar Islam Mata Air, di sisi lain menyebut Badan pembinaan Sekolah Islam Mata Air.

Dengan melegitimasi dan mendapat pengakuan dari masyarakat dan pemerintahan lokal, pengurus SIMA yang barupun tidak berani mengambil alih sekolah SIMA yang dijalankan Raisah. Di satu sisi, Raisah tidak mengakui pengurus tanah wakaf SIMA yang baru, sehingga sekolah SIMA tetap dijalankan Raisah di tengah kemelut pengurusan tanah wakaf tersebut dan tetap menyatakan diri sebagai pengurus SIMA. Anehnya, kegigihan Raisah mempertahankan sekolah yang dirintisnya semenjak tahun 1935, mendapat jaminan dari Azwar Anas, pengakuannya juga merupakan alumni dari sekolah Raisah. Sebagai ahli waris tanah wakaf, Azwar Anas melarang masyarakat Mata Air dan pengurus SIMA yang baru mengganggu sekolah yang dijalankan Raisah.

Walaupun Raisah tidak diakui oleh pengurus SIMA yang baru, namun sekolah yang dikembangkan Raisah semenjak tahun 1935, tetap menempati tanah wakaf tersebut. Sementara, Pengurus SIMA yang dipimpin oleh Maswir Poendek mendirikan SMP dan SMA di bawah pengurusan yayasan Syi'ar Islam Mata Air yang juga disingkat SIMA (Surat tanggal 16 November 1983 dengan Kop surat Yayasan Syiar Islam Mata Air). Di usia tuanya, Raisah tidak pernah menyerah dalam mengontrol sekolah SIMA, begitu juga sebagai pengurus tanah wakaf SIMA. Dengan demikian, hingga hari ini, terdapat dua SIMA di Mata Air, yakni Sekolah Islam Mata Air dan Syi'ar Islam Mata Air. Kemudian, dalam situasi yang penuh kemelut ini, pada tahun 1988 Raisah meninggal dunia.

KESIMPULAN

Periode Orde Baru adalah puncak permasalahan dalam perjuangan Raisah. Cerminan pola pemerintahan Orde Baru yang hirarkhis dan sentralistik, sangat tergambar dalam kasus Raisah. Meskipun demikian, keteguhan Raisah dalam memperjuangkan pendidikan dengan mengembangkan paham pembaharuan pada sekolah yang dibinanya, sesungguhnya telah melegenda pada masyarakat Mata Air. Di akhir hayatnya, Raisah tetap teguh dalam pendiriannya untuk melawan dominasi ulama tua di Mata Air, tanpa sokongan kuat dari penguasa daerah atau lokal yang umumnya cenderung cari aman, termasuk orang-orang Muhammadiyah yang mendapat posisi penting, baik di legislatif maupun di eksekutif. Meskipun, mereka sadar bahwa apa yang dilakukan Raisah adalah sebuah perjuangan yang benar, namun mereka mengakui akan ketidakmampuannya untuk memberikan bantuan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh seseorang dari Muhammadiyah, yang memiliki posisi penting di birokrat ketika itu “kami tahu apa yang dilakukan Raisah adalah sebuah kebenaran dan perjuangan, akan tetapi ibarat meja ini, memiliki empat kaki katanya, jika salah satu diantaranya patah maka tidak mungkin akan bisa berdiri”. Begitu juga dengan Perwakilan dari PPP ataupun partai lain, namun tidak mampu membantu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Raisah, karena mereka khawatir kedudukan mereka akan terganggu. Dalam hal ini, membantu Raisah berarti melawan atasan mereka yang lebih tinggi. Karena tindakan tersebut pun akan membahayakan karirnya dalam dunia politik, sebagaimana yang dialami oleh orang-orang yang terlibat dalam petisi 50 yang mengalami “pembunuhan politik” dan “mati secara perdata” (Syukur, 2012).

Perjuangan Raisah lebih ditekankan pada perjuangan untuk mempertahankan pendidikan Islam yang beraliran reformis di tengah-tengah masyarakat Mata Air yang sangat fanatik terhadap gerakan reformis.

Mereka itu adalah orang-orang kaum tua dan pendukung Perti. Kebetulan, pada masa Orde Baru, mereka memiliki kedudukan dalam pemerintahan lokal. Akibatnya, perjalanan hidup Raisah dalam menjalankan sekolah dan mengembangkan paham pembaharu di Mata Airharus berhadapan dengan pertarungan politik antar kaum tua (Perti) dan kaum muda (Muhammadiyah) di tengah masyarakat yang sedang memanfaatkan kekuasaan dan kedudukan di pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2010). *Seabad Muhammadiyah dalam pergumulan budaya Nusantara*. Global Pustaka Utama.
- Harian Haluan*. (n.d.).
- Harian Haluan*. (1952, 8 Mei).
- Kahin, A. (2008). Dari pemberontakan ke integrasi. *SUMBAR dan politik Indonesia 1926-1998*. Yayasan Obor Indonesia.
- Kato, T. (2005). *Adat Minangkabau & Merantau* (Vol. 6065). PT Balai Pustaka.
- Koto, A. 2012. *Persatuan Tarbiyah Islamiyah: Sejarah, Paham Keagamaan, dan Pemikiran Politik 1945-1970*. Jakarta: Grafindo.
- Nuryanti, R. (2011). *Perempuan berselimut konflik: Perempuan Minangkabau di masa Dewan Banteng dan PRRI*. Tiara Wacana.
- Permana, A. (2016). *Kebijakan politik wakil presiden Mohammad Hatta pada masa Revolusi Kemerdekaan RI (1945-1949)* [PhD Thesis]. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ramadhani, I. (2019). *Dinamika Politik Muhammadiyah pada masa Kepemimpinan KH. Mas Mansur (1937-1942 M)* [PhD Thesis]. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Saifuddin, A. F. (2014). *Keluarga dan rumah tangga: Satuan penelitian dalam perubahan masyarakat. Antropologi Indonesia*. Surat Kabar. (1956).
- Syafiâ, M. (2017). *Konstelasi Pemikiran Hukum dan Ham Historis dan Pengaruhnya Terhadap Instrumentasi Hukum Ham Pasca Reformasi*. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(1), 61–96.
- Saifuddin & Efendy, A. (1982). *Konflik dan Integrasi: Perbedaan Paham dalam Agama Islam*. Jakarta : Cv. Rajawali
- Syaifuddin, A. F. (2006). *Membumikan multikulturalisme di Indonesia*. *Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI*, 2(1), 3–10.
- Syukur, dkk. (2012). *Indonesia dalam Arus Sejarah*. PT Ichtiar Baru Van Hoeve Dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.
- Yusdiyanto, Y. (2015). *Telaah Rezim Partai Politik dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*. *Fiat Justisia*, 7(2).

